

**KEGIATAN CIFOR
DALAM EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI MENUJU ERA EKOLABEL**

**Oleh :
Rinekso Soekmadi**

*Center of International Forestry Research (CIFOR)
Bogor*

Pendahuluan

Berdasarkan amanah UUD 1945, khususnya Pasal 33, sumberdaya alam di bumi ini, baik yang berupa hutan maupun lainnya diperuntukan untuk kelangsungan hidup manusia menuju kesejahteraan. Akan tetapi dalam proses pemanfaatannya, disadari ataupun tidak, diakui atau tidak, campur tangan manusia terhadap proses-proses ekologis yang terjadi di dalam ekosistem hutan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan. Kehadiran teknologi di tengah kehidupan manusia yang semakin moderen diharapkan mampu mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang positif dengan sesedikit mungkin menimbulkan dampak negatif.

Pemanfaatan sumberdaya hutan mengikuti kaidah silvikultur secara benar merupakan upaya positif ke arah terciptanya kelestarian, baik fisik arealnya, komponen sumberdayanya (keanekaragaman hayati), produksinya, maupun fungsi lainnya. Penerapan sistem TPTI ataupun sistem silvikultur lain yang sesuai dengan tipe hutannya secara baik diharapkan mampu menjamin pengelolaan hutan secara lestari.

Dewasa ini sering kita dengar ataupun lihat di media-media masa tentang hutan lestari. Pertanyaannya adalah kondisi hutan yang bagaimana yang disebut lestari tersebut ? Guna menilai pengelolaan hutan yang lestari diperlukan serangkaian kriteria dan indikator kunci. Untuk itu berbagai negara (tropika maupun bukan tropika), termasuk Indonesia, telah menyusun standar (kriteria dan indikator) tersebut yang dianggap sesuai menurut kondisi negaranya. Bahkan beberapa standart diupayakan untuk berlaku umum untuk hutan tropika maupun bukan tropika, seperti ITW (*Initiative Tropenwald*), Woodmark (*Soil Association, Responsible Forestry Standards*), Smart Wood Program (*Rainforest Alliance*), Dutch Standards, dan sebagainya. Kelompok Kerja Lembaga Ekolabel Indonesia (POKJA-LEI) sebagai lembaga independen yang kepadanya dipercayakan untuk menyusun standar tersebut, untuk kondisi hutan tropika Indonesia, telah berupaya keras ke arah terciptanya pengelolaan hutan

secara lestari. Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) juga turut serta berperan aktif dalam menciptakan kondisi hutan lestari melalui serangkaian tolok ukur. Di sini perlu disampaikan bahwa CIFOR sebagai salah satu lembaga penelitian kehutanan internasional yang berdomisili di Bogor, Indonesia, tidak bermaksud menyusun standar baru tentang pengelolaan hutan secara lestari. Kegiatan CIFOR dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari ini akan dijelaskan kemudian.

Dalam pengelolaan hutan secara lestari, terdapat beberapa unsur yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang turut memberikan andil, yaitu HPH sebagai pelaksana langsung, Departemen Kehutanan sebagai pemegang kebijakan sekaligus berfungsi sebagai pengawas, pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan daerah dan berfungsi sebagai lembaga kontrol daerah dan berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial, LSM sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai kontrol, dan masyarakat sekitar hutan yang berperan sebagai subyek sekaligus obyek, serta perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dan sekaligus peneliti. Interaksi dari semua unsur tersebut secara harmonis akan lebih menjamin terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Selain hal tersebut, hal yang paling mendasar dalam upaya menciptakan kondisi pengelolaan hutan secara lestari adalah itikad baik dari masing-masing unsur tersebut dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Pengertian Pengelolaan Hutan Secara Lestari

Banyak pakar yang membahas batasan kelestarian hutan, kemudian mereka memberikan sendiri batasan mengenai kelestarian tersebut menurut versinya masing-masing yang pada dasarnya mengacu pada batasan *sustainable development* (World Commission on Environment and Development) dan *sustainable management* (ITTO).

ITTO (1991) dalam konferensi di Yokohama, Desember 1991, memberikan batasan tentang pengelolaan hutan lestari sebagai suatu proses dari manajemen hutan tetap (*permenent forest land*) untuk mencapai satu atau lebih tujuan khusus dengan mempertimbangkan kontinuitas produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan tanpa mengurangi nilai inheren dan produktivitas yang akan datang, serta menghindari dari dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan fisik maupun sosial. Dari batasan tersebut tampak bahwa kelestarian tergantung dari tujuan akhir yang direncanakan. Sementara itu, Wan Razali (1994) menyatakan bahwa kelestarian hutan tropika mencakup dua perbedaan yang mendasar, yaitu kelestarian produksi (*oultum timber/logs*), dan kelestarian biologi keanekaragaman hayati (*biological sustainability*). Dikatakan oleh Poore (1988) dalam Wan Razali (1994) bahwa kelestarian

hutan, dalam hal ini kelestarian produksi atau kelestarian hasil panen dinyatakan dalam dua kondisi yang mungkin berlawanan sebagai berikut :

- (1) *If production of timber is to be genuinely sustainable, the most important condition to be met is that nothing should be done that will irreversibly, reduce the potential of the forest to produce marketable timber - that is there should be no irreversible loss of soil, soil fertility or genetic potential in the marketable species. It does not necessarily mean that no more timber should be removed in a period that is produce by new growth, overcutting in one cycle can at least - theory be compensated by undercutting in the next or prolonging the cutting cycle.*
- (2) *But even this description of sustainable production raises several questions. For example will certainly change one phase of logging and the next - new species will become marketable. So the timber production to be sustained will not be the same from one cutting cycle to the next: it will contain a different mix of species.*

Sample *et al.* (1993) mengatakan bahwa pengertian pengelolaan hutan secara lestari mengalami pergeseran (*evolution*), dari hanya sekedar lestari hasilnya (*sustained yield management*) yang hanya terdiri dari beberapa spesies pohon komersial ke arah lestari ekosistem yang lebih menjanjikan kelestarian pengelolaan hutan secara keseluruhan. Dengan demikian pada abad 21 nantinya, pengelolaan hutan sebagai kesatuan ekosistem secara lestari akan menjadi suatu kebijakan yang biasa (*convensional wisdom*).

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Prabhu (1994; 1995) yang memberikan batasan bahwa pengelolaan hutan secara lestari dapat dilihat sebagai serangkaian dari tujuan kegiatan dan hasil yang konsisten dengan tetap terpeliharanya (bahkan jika mungkin meningkatkan) integritas dari ekosistem hutan dan kontribusi untuk masyarakat sekitar. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap kelestarian hutan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) jaminan terhadap integritas ekosistem, termasuk jaminan ketersediaan permudaan dan sesedikit mungkin kehilangan unsur keanekaragaman hayati, serta (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Batasan di atas merupakan pernyataan yang ideal untuk sebuah pengertian pengelolaan hutan lestari. Seorang senior kehutanan asal Inggris, Peter Burgess melihat kondisi pengelolaan hutan lestari lebih realistis dan agak simple, yaitu lebih menekankan pada fungsinya. Hal yang terpenting adalah luas hutannya tidak berkurang, regenerasi spesies komersial cukup memadai untuk berbagai tingkat pertumbuhan dan perlakuan (*treatment*) yang benar selama jangka pengusahaan (*pers. comm, Maret 1995*). Alasan yang dikemukakan adalah dengan pengelolaan hutan yang baik menurut kaidah kelestarian hasil, dengan sendirinya keberadaan hutan beserta fungsinya akan tetap utuh dan penurunan kualitas hutan dapat ditekan.

Kegiatan CIFOR dalam Uji Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari

Latar belakang

Kegiatan ini berawal dari pertemuan pakar kehutanan di Weilburg, Jerman pada bulan Pebruari 1994 yang membahas kemungkinan perbandingan uji lapangan dari beberapa kriteria dan indikator beberapa negara yang dianggap sudah layak untuk diuji dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tropika secara lestari. Standard yang dianggap sudah layak diuji adalah standard dari Smart Wood Program (Rainforest Alliance), Soil Association (Responsible Forestry Standards) dan ITW (Initiative Tropenwald). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan serupa untuk negara-negara Eropa di Eschborn, Jerman pada bulan Juni 1994. Selanjutnya ditetapkan CIFOR, sebagai badan penelitian kehutanan internasional, sebagai organisasi pelaksana. Adapun kegiatan ini dibiayai oleh European Commission, GTZ (German Agency for Technical Cooperation), dan sejumlah kecil dari ATO (African Timber Organization). Kegiatan ini di bawah koordinasi Divisi 2 CIFOR. Koordinator proyek ini adalah Dr Ravi Prabhu.

Dalam usulan kegiatannya, negara yang akan menjadi tempat pengujian kriteria dan indikator tersebut adalah Jerman, Indonesia, Pantai Gading (Cote d'Ivoire) Afrika dan Brasilia. Dalam perkembangan terakhir, kemungkinan pengujian diperluas ke Australia, Kanada atau Finlandia. Pengujian di Jerman telah dilakukan pada bulan Oktober 1994 di Forstamt Bovenden, Lower Saxony. Pengujian di Indonesia juga telah dilaksanakan pada bulan Maret 1995 di HPH PT Kiani Lestari, Kalimantan Timur, sedangkan di Pantai Gading dilakukan pada bulan Juni 1995. Pengujian berikutnya adalah di Brasilia yang direncanakan pada bulan Oktober 1995.

Kriteria dan indikator yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah Woodmark (*Soil Association*), Smart Wood Program (*Rainforest Alliance*), POKJA-LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), ITW (German Standards) dan Dutch Working Group (DDB).

Tujuan

Kegiatan ini dipersiapkan dalam rangka menyongsong diterapkannya sertifikasi/labelling produk kehutanan tahun 2000. Tiga tujuan utama yang ingin dicapai dari keseluruhan kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi kriteria dan indikator yang obyektif, relevan dan hemat biaya (*cost-effective*) untuk pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan pada set kriteria dan indikator yang telah ada, yaitu Woodmark, ITW, Smart

Wood Program, LEI dan DDB. CIFOR tidak menyusun kriteria dan indikator baru untuk pengelolaan hutan lestari.

2. Mengembangkan metode yang digunakan untuk menilai kriteria dan indikator sehingga lebih obyektif.
3. Mengembangkan sistem evaluasi dari pengelolaan hutan lestari secara keseluruhan berdasarkan rekomendasi kriteria dan indikator yang diberikan oleh tim ahli (expert panels) dan saran-saran workshop.

Keluaran yang diinginkan dari kegiatan ini pada akhirnya diharapkan untuk dijadikan alat yang dapat membantu dalam mengembangkan kriteria dan indikator masing-masing standar.

Waktu dan lokasi

Kegiatan proyek ini dibagi dalam dua fase periode, yaitu fase I (Agustus 1994 sampai Januari 1996) dan fase II (Pebruari 1996 sampai Januari 1998). Untuk fase pertama, pengujian telah dan akan dilakukan di Negara Jerman, Indonesia, Pantai Gading dan Brasilia; sedangkan untuk fase kedua masih belum ditetapkan secara pasti.

Struktur proyek dan mekanisme pengujian

Tiga klasifikasi penting yang layak dicatat selama setengah perjalanan proyek ini adalah (1) proyek ini terfokus pada kriteria dan indikator untuk pengelolaan hutan alam secara lestari pada level unit pengelolaan (*management unit level*). (2) keseluruhan pembahasan tentang kekuatan dan kelemahan dari salah satu standar tidak diperhitungkan sebelumnya dan bukan merupakan keluaran dari proyek ini, dan (3) proyek dipusatkan pada evaluasi kriteria dan indikator, dengan demikian tujuan proyek sama sekali tidak untuk menilai HPH yang terpilih sebagai lokasi pengujian.

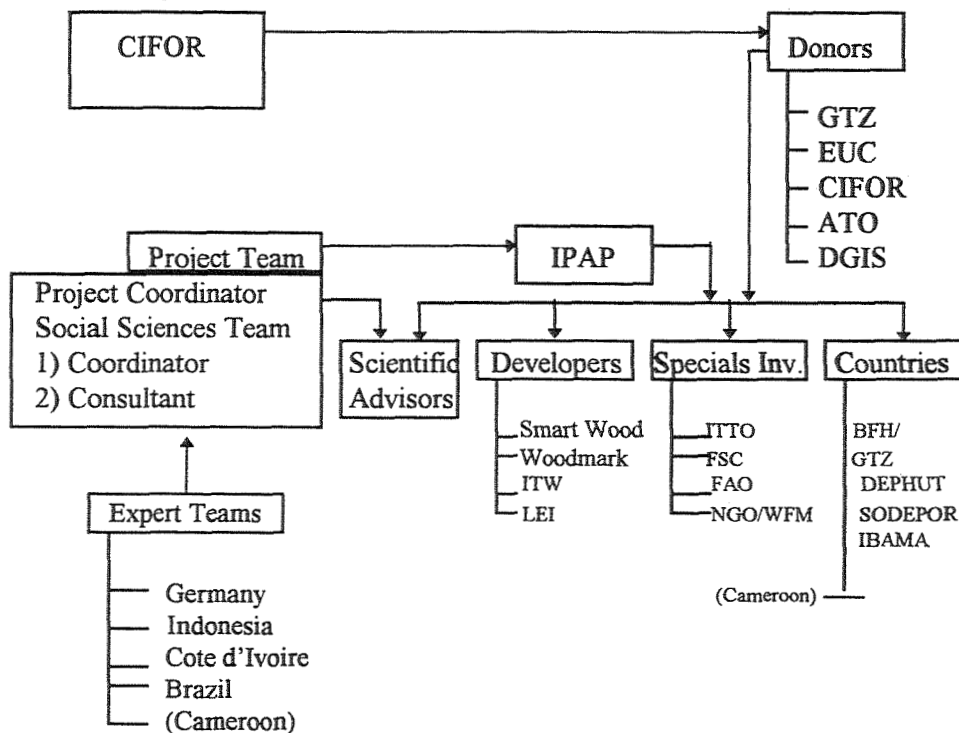
Di CIFOR, proyek ini ditempatkan pada Divisi 2 : *Natural Forest Ecology and Management* di bawah Dr. Dennis Dykstra sebagai direktur, berkaitan sangat erat dengan Divisi 1 : *Policies and Social Sciences* dengan direktornya Dr. Neil Byron. Secara keseluruhan struktur proyek ini dapat dilihat pada *Gambar 1*.

Metode yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari adalah sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang digunakan dalam evaluasi, yaitu Smart Wood, Woodmark, ITW, LEI dan DDB.
2. Menyaring serangkaian kriteria dan indikator pada setiap standar oleh expert panel (tim ahli) yang telah ditunjuk berdasarkan *professional judgement*, dengan menggunakan formulir-1. Pekerjaan ini dilakukan di atas meja.

3. Tim ahli selanjutnya mengadakan pertemuan untuk membahas lagi kriteria dan indikator terseleksi dan mengisikannya pada formulir-2.
4. Tim ahli meninjau ke lapangan dan melihat langsung kondisi pengelolaan hutan alam (jika perlu dilakukan pengukuran), berdiskusi, untuk menyaring sekali lagi kriteria dan indikator yang telah diseleksi.
5. Pada akhir kegiatan lapangan, dilakukan workshop yang juga dihadiri para ahli kehutanan dan ahli lain yang terkait untuk kemudian menelorkan draft kriteria dan indikator yang sesuai dengan tujuan proyek.

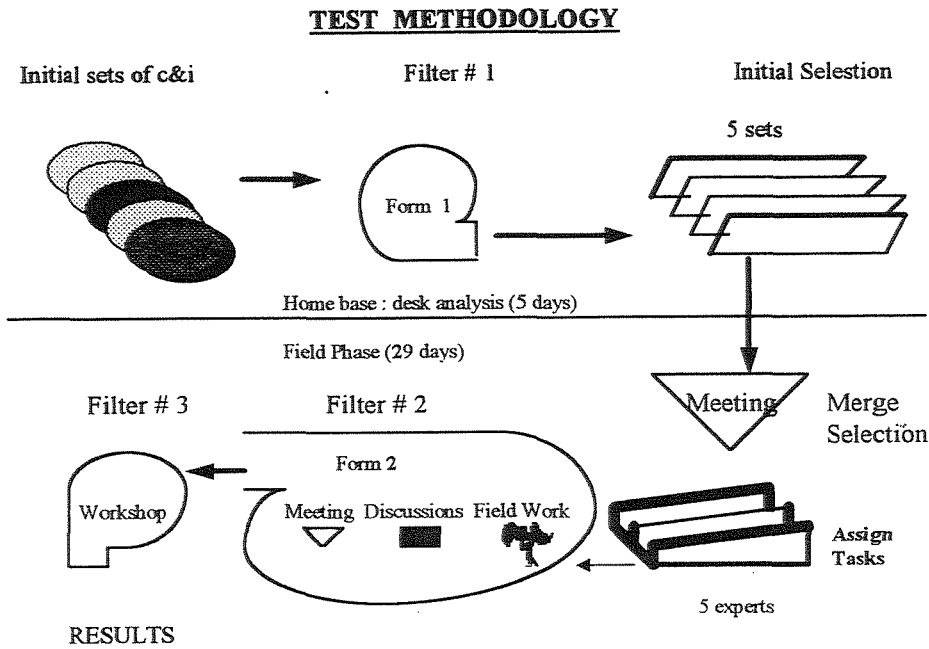
Mekanisme evaluasi ini dapat dilihat pada Gambar 2. Mekanisme ini diulang kembali dan disempurkan terus metodenya setiap kali evaluasi lapangan di beberapa negara contoh.



Keterangan :

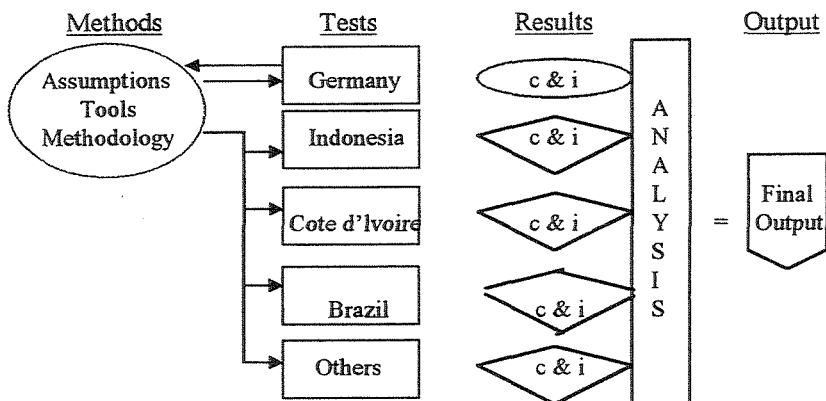
IPAP : International Project Advisory Panel (badan yang terdiri dari perwakilan organisasi yang terlibat langsung dalam proyek. Dalam hasil pertemuan IPAP pertama di Bogor telah ditunjuk Ir Loekito Daryadi, M.Sc sebagai Ketua dan Koordinator Proyek sebagai Sekretaris ex-officio.

Gambar 1. Diagram Struktur Organisasi Proyek Evaluasi Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari (CIFOR, 1995)



Gambar 2. Diagram Mekanisme Pengujian Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari (Revisi berdasarkan Hasil Pengujian di Indonesia)

Dari hasil pengujian di setiap negara contoh, masing-masing kriteria dan indikator yang diperoleh akan dianalisis secara keseluruhan dan diharapkan dapat dirumuskan satu set kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang obyektif, berlaku umum dan hemat biaya. Mekanisme analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Analisis Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari Hasil Evaluasi di Negara-Negara Contoh

Pengujian di Indonesia

Pada mulanya, pengujian di Indonesia akan dilakukan di HPH PT Sumalindo. Penunjukkan HPH ini berdasarkan arahan dari Menteri Kehutanan. Akan tetapi dalam perjalannya, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan secara resmi menyarankan bahwa lokasi pengujian di HPH PT Kiani Lestari di Batu Ampar, Kalimantan Timur. Akhirnya CIFOR mengikuti saran resmi dari Dirjen Pengusahaan Hutan.

Pada pengujian ini difokuskan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator untuk kondisi PT Kiani Lestari di Batu Ampar. Set kriteria dan indikator ini dipersiapkan untuk dibahas dalam workshop di Samarinda tanggal 30 Maret - 2 April 1995.

Daftar Pustaka

- Prabhu, B.R., H.J. Weidelt and S. Leinert. 1993. *Sustainable Management of Tropical Rainforests : Experiences, Riskz, and Opportunities. An Investigation Based on Four Case Studies. Research Reports of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany, Bonn.*
- Prabhu, B.R. 1995. *Testing Criteria and Indicators for the Sustainable Management if Forests : An Interim Report. Center for International Forestry Research, Bogor.*
- _____. 1994. *Assessing Criteria for the Sustainable Management of Forests. Proceedings of the International Conference on Forest Product Certification : A Case Stuy of Indonesian Schmene, Puncak, September 14 - 17, 1994, RMI DIFERS, Bogor.*
- Sample, V.A., N. Johnson, G.H. Aplet and J.T. Olson. 1993. *Defining Sustainable Forestry. The Wilderness, Washington D.C.*
- Wan Razali bin Mohd. 1994. *Sustainable Forest Management in ASEAN with Special Reference to Sustainable Timber Production in Malaysia. FRIM Reports Np. 61, Januari 1994.*